

Falsafah Dasar Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera



PKS

Penyusun:

Majelis Pertimbangan Pusat

Partai Keadilan Sejahtera

2021

Pendahuluan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan memuliakannya di atas makhluk-makhluk lainnya. Bahkan kemudian menundukkan apa saja yang ada di langit dan bumi untuk manusia. Dengan kelebihan-kelebihannya itu, manusia akhirnya disematkan sebagai mandataris Allah di muka bumi. Manusia telah dikaruniai segenap keunggulan untuk berjuang menjalankan misi pemakmuran, bukan hanya bagi umat manusia itu sendiri, melainkan bagi seluruh makhluk di alam semesta lainnya dalam kerangka keadilan.

Demi menjalankan misi otentik manusia itu, Allah SWT menurunkan agama Islam sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, yang menjadi penyempurna seluruh risalah kenabian semenjak Nabi Adam AS. Islam oleh karenanya adalah tatanan nilai-nilai yang menjaga hak-hak dasar manusia yang bersifat universal dengan penuh keadilan dan menjadi rahmat bagi semua makhluk di alam semesta.

Tatanan nilai-nilai yang menjaga hak-hak dasar manusia, tercermin dan ditegaskan dalam alinea pertama dan ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea pertama menyatakan bahwa *kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*. Lebih lanjut dalam alinea ke empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya negara adalah untuk *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia*. Dengan demikian, terlihat bahwa nilai-nilai Islam yang menjadi rahmat bagi semua makhluk di alam semesta ini telah tergambar dengan jelas dalam tujuan bernegara tersebut.

Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dikukuhkan bahwa Indonesia adalah negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara memberi jaminan pada warganya untuk beragama dan menjalankan peribadatannya. Negara hadir untuk menjamin agar semangat keagamaan mewarnai seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesadaran dan semangat keagamaan yang berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa begitu mendalam telah dihayati sejak awal kemerdekaan, bahwa kemerdekaan sebagai berkah dan rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa, kesadaran tersebut akan terus mewarnai perjalanan bangsa Indonesia kedepan, sebagai negara kepulauan dan bercirikan Nusantara dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Indonesia yang berkeadilan selalu diteguhkan dalam seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan sebuah bangsa dan ketertiban dunia adalah cermin tegaknya keadilan yang bersifat universal. Cita-cita persatuan, kedaulatan, dan kemakmuran bangsa tidak bisa terwujud tanpa tegaknya keadilan.

Dengan demikian, moralitas keagamaan dan keadilan telah ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 untuk menjadi sendi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keduanya bukan hanya menjiwai seluruh dimensi kenegaraan tapi sekaligus menjadi elan vital pendorong terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Pada gilirannya moralitas keagamaan dan keadilan menjadi prasyarat mutlak kemajuan peradaban bangsa Indonesia di berbagai bidang, mulai dari bidang keagamaan; politik, hukum dan hak asasi manusia; pertahanan dan keamanan; ekonomi; pertanian dan kelautan; ketenagakerjaan; sumber daya alam, agraria, kehutanan dan lingkungan hidup; pendidikan, sosial dan budaya; kesehatan; hubungan internasional; ilmu pengetahuan dan teknologi; serta individu, keluarga, dan kemitraan hubungan laki-laki dan perempuan.

Perjuangan menegakkan keadilan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional Indonesia, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. PKS sebagai salah satu entitas partai politik di Indonesia, sesuai dengan visinya yang tertuang dalam pasal 6 Anggaran Dasar, menyatakan ingin menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka memberikan landasan, arah, tujuan tentang nilai-nilai yang akan diperjuangkan PKS dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, disusunlah Falsafah Dasar Perjuangan Partai.

Definisi dan Tujuan

DEFINISI

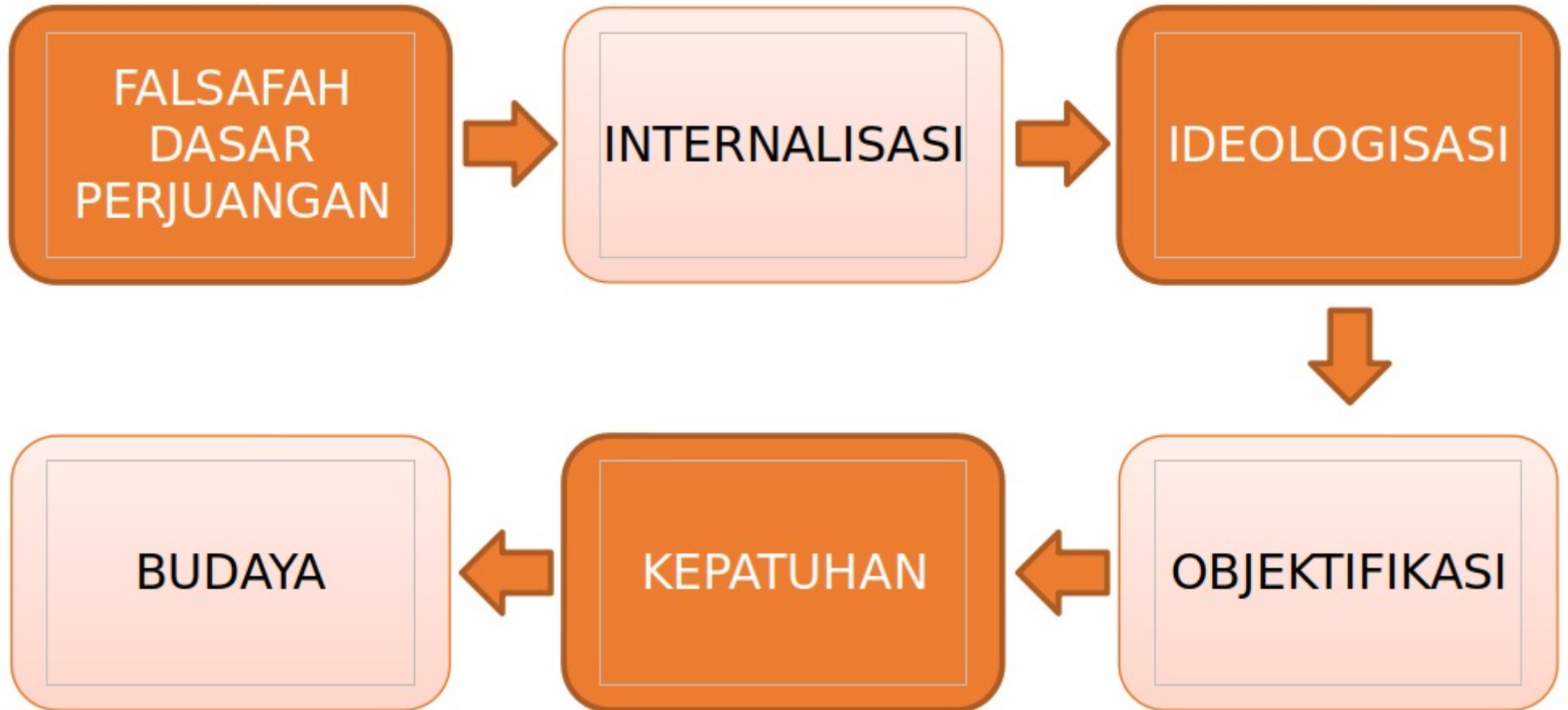
Falsafah Dasar Perjuangan PKS adalah pemikiran mendasar tentang nilai-nilai yang diperjuangkan PKS, hasil dari proses objektifikasi nilai-nilai Islam rahmatan lil'alam, dalam memberikan landasan, arah dan tujuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

TUJUAN

Tujuan perumusan Falsafah Dasar Perjuangan PKS adalah:

- Sebagai rujukan utama dalam proses konsolidasi ideologisasi Partai;
- Sebagai pengejawantahan arah perjuangan Partai sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS; dan
- Sebagai acuan dasar para Anggota Partai dalam berjuang di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Proses Konsolidasi Ideologisasi Partai



Bagan Falsafah Dasar Perjuangan PKS

ISLAM

Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia, lingkungan, dan alam semesta.

KEADILAN

Keadilan merupakan kebajikan utama umat manusia yang keberadaannya mutlak diperlukan sepanjang sejarah kemanusiaan.

KEBANGSAAN

Wawasan kebangsaan dibangun dengan kesadaran bahwa Islam mengajarkan umat manusia untuk mencintai Tanah Airnya dan menjaga kesepakatan luhur yang diwarisi dari generasi ke generasi.

KENEGARAAN

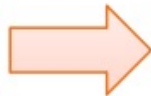
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan rahmat Allah yang perlu disyukuri dan dijaga untuk mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

KESEJAHTERAAN

Memajukan kesejahteraan umum merupakan cita-cita nasional yang harus diperjuangkan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagan Falsafah Dasar Perjuangan PKS

KENEGARAAN



1. Keagamaan

2. Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia

3. Pertahanan dan Keamanan

4. Ekonomi

5. Pertanian dan Kelautan

6. Ketenagakerjaan

**7. Sumber Daya Alam, Agraria, Kehutanan,
dan Lingkungan Hidup**

8. Pendidikan, Sosial dan Budaya

9. Kesehatan

10. Hubungan Internasional

11. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

**12. Individu, Keluarga, Hubungan Kemitraan
laki-laki dan Perempuan**

Bab 1 Islam

Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia, lingkungan, dan alam semesta.

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang ajarannya bersifat komprehensif, melingkupi dimensi keyakinan, nilai, pedoman hidup dalam berbagai aspek, dan dimensi-dimensi lain yang tercakup dalamnya. Kehadiran Islam sejatinya merupakan karunia bagi seluruh alam, sebagaimana tujuan pengutusan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia tidak lain kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta (QS. Al-Anbiya: 107) dan (QS. Ali Imran : 159).

Rahmat bagi alam semesta mengandung makna bahwa rahmat yang disebarkan Islam ditujukan bagi seluruh manusia, tidak memandang Muslim ataupun pemeluk agama lain; tidak terbatas latar belakang budaya atau ras tertentu; tidak memandang anak kecil, muda ataupun dewasa. Bahkan, bukan hanya ditujukan pada manusia, rahmat Islam juga melimpah bagi hewan, tanaman, benda mati, dan juga seluruh isi alam semesta.

Ajaran Islam yang mendatangkan kerahmatan ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi sejak diutusnya Nabi Adam AS dan menjadi sempurna pada masa Nabi Muhammad SAW hingga datangnya hari kiamat kelak. Rahmat bagi alam semesta yang didatangkan oleh ajaran Islam itu tidak hanya melintasi dimensi ruang dan obyek, tetapi juga melintasi dimensi waktu.

Islam sebagai rahmat bagi alam semesta terlihat dari ajaran Nabi Muhammad SAW untuk tidak menyia-nyiakan benda mati sekalipun, seperti tuntunan untuk membersihkan jalan dari gangguan, mengkonsumsi makanan seperlunya, memperbaiki barang-barang yang masih bisa diperbaiki, atau juga memperhatikan kebermanfaatan air dan tanah. Islam sangat peduli dengan lingkungan sekitar dan berbagai benda mati lainnya.

Sabda Nabi SAW: "Uhud adalah sebuah gunung yang cinta kepada kita, dan kita cinta kepadanya" (HR Anas). Tentu saja Nabi Muhammad SAW mengajarkan kasih sayang, toleransi, kerjasama, pembangunan intelektual dan moral, dan segala bentuk peningkatan aspek kehidupan manusia secara moril maupun materil.

Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Islam, diutus kepada umat manusia seluruhnya (QS. Saba: 28). Islam menjawab semua kebutuhan manusia. Bahkan, di masa perang sekalipun, rahmat Islam tetap dipertahankan. Sejarah perjuangan Nabi mengungkapkan, bahwa ketika perang Uhud berlangsung, gigi beliau patah kena lemparan batu dan wajah beliau terluka. Seorang sahabat berkata:" Kiranya tuan mau mengutuk mereka", yakni musuh Islam. Rasulullah Saw menjawab: "Aku tidak diutus Allah sebagai pengutuk, tetapi aku diutus sebagai pendakwah dan pembawa rahmat. Ya Allah, berilah kaumku ini petunjuk sebab mereka tidak mengetahui" (HR Muslim).

Ajaran Islam akan relevan dalam setiap zaman dan tempat. Oleh karena itu, ajaran Islam dapat diterima oleh berbagai bangsa atau suku, dapat dipahami oleh beragam manusia yang berbeda dalam bahasa, dan dapat diyakini oleh beragam manusia yang berbeda bentuk fisik ataupun warna kulit. Manusia dari berbagai wilayah, pedesaan, perkotaan, maupun seluruh belahan dunia, dari berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, dan politik, menerima ajaran Islam sebagai jawaban atas pertanyaan dan kebutuhan mereka. Inilah bentuk rahmat Islam untuk umat manusia dan alam semesta.

Pengejawantahan *rahmatan lil alamiin* diwujudkan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam meliputi:

- 1) kasih sayang dan kelemahlembutan,
- 2) kemoderatan,
- 3) persatuan dan kebersamaan,
- 4) budaya ilmu,
- 5) substansi dan objektifikasi.

1) Kasih sayang dan kelemahlembutan mencerminkan bahwa Islam berdiri di atas pendekatan penuh cinta dan keramahan, bukan dilandasi kekerasan dan kebencian. Teks-teks Islam dipenuhi dengan nasihat, keteladanan, ataupun sejarah tentang bagaimana kasih sayang dan kelemahlembutan menjadi sarana utama dalam keberhasilan dakwah Islam. Akhlak yang baik menarik manusia kepada nilai Islam, dan mendorong manusia untuk menikmati, merenungi, dan mencintai Islam. Sebaliknya, kekasaran dan kekerasan hati akan menjauhkan manusia, bahkan menjadikan mereka benci kepada Islam.

Jika orientasi dari setiap perjuangan adalah niat ikhlas kepada Allah SWT dan tulus kepada manusia, maka perlawanan dan kebencian dari orang-orang yang tidak mengerti tidaklah akan memancing emosi dan tidaklah pula akan merusak kesabaran seorang Mukmin untuk tetap fokus kepada tujuan-tujuan besarnya.

2) **Kemoderatan** membawa pelajaran bahwa Islam adalah ajaran yang mendorong sikap pertengahan (*wasathi*). Yang dimaksud dengan kemoderatan adalah keseimbangan atau kelurusan di antara dua sisi yang saling bertentangan atau berlawanan, tidak mengambil salah satunya dengan melebihi haknya, atau tidak mengunggulkan salah satu sisi dan kemudian mengalahkan sisi yang lain. Moderat adalah berada di tengah-tengah di antara dua kutub permasalahan yang bertentangan.

Sikap ekstrim atau berlebih-lebihan telah menyulitkan manusia dan menjadikan mereka tidak mampu menangkap keindahan nilai dan makna dari agama dan kehidupan. Sedangkan sikap meremehkan atau melalaikan telah menjadikan manusia menjauh dari agamanya dan tidak mengenali fungsi dan manfaat dari ajaran kehidupan. Kebaikan itu adalah apa yang ada dalam sikap moderat di antara sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan, antara sikap melampaui batas dan sikap melalaikan. Umat Islam, dengan sikapnya yang moderat dalam beragama dan bermasyarakat, senantiasa memancarkan nilai-nilai kebaikan dan keindahan Islam dari dirinya, sehingga ajaran Islam itu benar-benar dirasakan oleh orang di sekitarnya dengan penilaian yang tinggi dan kemanfaatan yang besar bagi kehidupan manusia.

3) Persatuan dan kebersamaan membawa pelajaran bahwa Islam hendak menyatukan komponen-komponen umat Islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam semangat dan perjuangan yang sama untuk memajukan Indonesia. Nilai persatuan dan kebersamaan ini membawa kesadaran umat Islam untuk bekerjasama dengan komponen lain dalam hal-hal yang disepakati dan saling memaklumi dalam hal-hal yang tidak disepakati, serta untuk bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat.

Nilai persatuan dan kebersamaan ini juga membawa pelajaran bahwa Islam memandang seluruh umat manusia sebagai satu keluarga walaupun berbeda agama. Jika kita berbeda agama, kita bisa bersaudara sebagai sesama bangsa (*ukhuwah wathaniyah*) dan sebagai sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*). Jika saja Allah SWT menghendaki, maka Dia akan jadikan manusia itu umat yang satu (QS. An-Nahl: 93). Tetapi realitasnya Allah SWT berkehendak bahwa manusia berbeda-beda dalam keyakinan atau agama mereka. Oleh karena itu, seorang muslim mengedepankan toleransi dengan umat agama lain, dan juga akan bekerjasama dalam banyak hal penting yang menjadi tugas bersama untuk membangun bangsa Indonesia.

Masalah-masalah bangsa tidak bisa diselesaikan sendiri. Masalah yang kompleks dan multidimensi itu memerlukan gabungan para pakar, para pemikir, dan para profesional dari berbagai bidang, lintas kelompok dan lintas agama. Oleh karenanya, penting untuk bekerjasama antar komponen bangsa, bersungguh-sungguh membangun persatuan dan kebersamaan bagi kemajuan bangsa Indonesia.

- 4) **Budaya ilmu** membawa pelajaran bahwa perjuangan dakwah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dikelola dengan basis keilmuan yang kuat, manajemen yang sistematis dan terukur, serta pengambilan keputusan yang ilmiah, berdalil, dan rasional. Dakwah Islam bukanlah perjuangan yang emosional, tergesa-gesa, dan tidak teratur.

Kerangka kerja ilmiah akan menjauhkan dari sikap subjektif, apologetik, berkhayal, kemudian bergerak menjadi lebih rasional, objektif, dan terbuka pada ilmu pengetahuan. Sebagaimana dakwah Islam membangkitkan potensi keilmuan di tengah masyarakat jahiliyah dan membangun benih peradaban baru di masa keruntuhan peradaban Romawi dan Persia.

Wahyu pertama yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membaca (QS Al-Alaq: 1-5) dan mengenal Sang Khaliq yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk pembelajar. Kemudian dilanjutkan dengan wahyu yang mengajarkan untuk menulis, “Demi pena dan apa yang mereka tuliskan” (QS Al-Qalam: 1) menjadikan ilmu sebagai inti ajaran Islam.

Dengan budaya ilmu, maka perjuangan akan bersifat lebih strategis, sistematis, profesional, terukur, sehingga target, cita-cita, atau tujuan dakwah bisa diyakini pencapaiannya dan mudah diterima oleh akal manusia pada umumnya. Dengan budaya ilmu ini pula peradaban Islam telah menjadi inspirasi bagi kebangkitan peradaban Barat di Eropa. Tugas sejarah itu yang harus kita warisi di masa kini, dengan menyerap ilmu dan hikmah dari manapun asalnya.

5) Substansi dan objektifikasi

Substansi membawa pelajaran bahwa umat Islam mencurahkan perhatian bukan hanya kepada simbol, format, dan label Islamnya saja, melainkan juga pada substansi dan nilai ajaran Islam. Simbol dan substansi ajaran Islam perlu diimplementasikan dalam konteks kekinian dan kedisinian, sehingga nilai-nilai Islam senantiasa relevan bagi umat manusia sepanjang zaman.

Islam dalam aspek akidah mengandung substansi ketauhidan, dalam aspek ibadah mengandung substansi keikhlasan, dan dalam aspek syariat mengandung substansi keadilan. Demikianlah nilai-nilai Islam itu mengandung substansi yang kuat bagi kebaikan manusia, bukan semata label atau formatnya saja.

Sedangkan **objektifikasi** adalah penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif. Yakni, upaya untuk menjabarkan atau merealisasikan substansi dan nilai Islam itu kepada kategori-kategori yang terlihat, terukur, teruji, dan objektif oleh manusia pada umumnya. Objektifikasi mencerminkan proses agar ideologi, nilai, dan pandangan yang awalnya dipandang bersifat normatif-subjektif dalam internal umat Islam menjadi prinsip dan nilai-nilai objektif yang diterima wajar oleh masyarakat secara luas dan dirasakan keberadaannya dalam tingkat realita.

Objektifikasi juga merupakan implementasi dari keyakinan internal (dalam agama Islam). Suatu perbuatan Muslim disebut objektif apabila perbuatan itu dirasakan oleh pemeluk agama lain sebagai sesuatu yang natural dan logis. Dengan upaya ini, maka nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam ruang publik yang plural.

Wawasan kerahmatan Islam bagi alam semesta membuka pemahaman penting bahwa Islam tidak hanya mencakup wilayah pribadi tetapi juga wilayah publik; tidak hanya dimensi metafisika tetapi juga material; tidak hanya mengatur hubungan vertikal tetapi juga horizontal; tidak hanya masalah spiritual-ketuhanan tetapi juga sosial-kemanusiaan.

Sebagaimana terungkap dalam sejarah kenabian, ketika seorang penagih utang, Zaid bin Sun'ah, datang kepada Rasulullah Saw menagih utang secara kasar sekali. Ia merenggutkan selendang Rasulullah seraya berkata: “Kalian, hai keturunan Abdul Muthalib, memang tukang mengulur-ulur waktu membayar utang!” Umar bin Al Khattab menghardik orang tadi. Tapi, sambil tersenyum Rasulullah berkata, “Umar! Orang ini dan saya membutuhkan darimu hal yang lain dari itu. Yaitu engkau suruh dia menagih secara baik dan kau suruh aku melunasi utangku secara baik pula.”

Kemudian Nabi berkata, “Sebenarnya masih ada tenggang waktu tiga hari lagi untuk membayar utang itu”. Lalu beliau menyuruh Umar membayarkan utang beliau dengan tambahan sedikit sebagai imbalan dari bentakan Umar tadi. Itulah pula yang menjadi sebab masuknya Zaid ke dalam golongan kaum Muslimin. Rasulullah Saw menunjukkan sebagai penyebar risalah kebenaran tetap memegang teguh komitmen kepada sesama warga, tidak akan menciderainya. Pesan dan tindakan Rasulullah menyatu sebagai teladan kemanusiaan.

Orang-orang beriman yang senantiasa memegang Islamnya, baik dalam perbuatan maupun perkataan, adalah orang-orang yang memegang falsafah Islam dalam hidupnya, mereka yang berprestasi tinggi, tidak mudah kalah dengan beragam kesulitan, dan mereka dapat memberikan manfaat di muka bumi secara luas, siang ataupun malam, sulit ataupun lapang. Mereka adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, profesional, berjiwa patriotik, dan mencintai negerinya. Demikianlah Islam dan orang-orang Islam akan menjadi rahmat bagi lingkungan sekitarnya.

Dengan cara inilah nilai-nilai Islam yang agung itu dapat dirasakan oleh berbagai umat manusia tanpa membedakan agamanya, dan kemudian nyatalah bahwa Islam itu adalah rahmat bagi semuanya, rahmat bagi semesta alam. Tidak terkecuali dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk ini, nilai-nilai Islam sebagai rahmat akan relevan dan menjadi inspirasi penting dalam membangun bangsa.

Dengan pengejawantahan nilai-nilai rahmat, Islam akan memimpin tidak dengan pemaksaan atau dominasi. Tetapi Islam akan memimpin dengan mengisi hati, pikiran, dan nilai-nilai dalam diri umat manusia. Maka umat Islam tidak pernah berpikir bahwa orang-orang yang berbeda adalah musuh yang harus ditundukkan dan dijatuhkan. Alih-alih demikian, umat Islam justru melihat setiap orang dengan rahmat untuk bersama-sama menuju kebaikan.

Dialog antara Nabi Muhammad dengan pamanda Abu Thalib memperlihatkan sikap konsisten dalam menegakkan kebenaran sejalan dengan sikap santun dalam mengkomunikasikan kebenaran dan menjaga hubungan kekeluargaan.

Dalam catatan sejarah, Abu Thalib yang menjadi pelindung dan pembela Muhammad Saw didatangi oleh Quraisy. Mereka mengancam dan menantang, seraya berkata: “Wahai Abu Thalib, tuan ini sudah cukup umur, berkedudukan terhormat, tuan kami hormati dan kami segani. Kami telah meminta kepada tuan agar mencegah keponakan tuan, tetapi tuan tak mencegahnya. Kami tak dapat bersabar lagi menahan diri menghadapi tingkahnya yang memandang rendah budi akal kami. Seharusnya Tuan melarangnya berbuat demikian, atau kami akan perang di bersama-sama Tuan juga sekalian sampai binasa salah satu dari kedua golongan kita.”

Seperginya orang-orang Quraisy tadi rupanya Abu Thalib merasa berat juga menantang suku bangsanya secara frontal seperti itu. Kepada keponakannya Muhammad SAW, Abu Thalib berkata: “Pemuka-pemuka Quraisy tadi mendatangi, meminta agar engkau tidak meneruskan dakwahmu itu atau mereka akan menantang perang. ...

... Cobalah anakku engkau pikirkan hal ini dan janganlah aku ini sampai engkau bebani lebih dari kemampuanku.” Muhammad tertegun sejenak, merenungkan sikap dan keadaan psikologis pamannya yang sudah tua itu.

Roda dakwah seakan-akan terhenti sejenak menantikan sikap apa yang akan dipilih oleh Muhammad. Pilihannya akan berakibat berhentinya perputaran roda dakwah itu sama sekali atau terus berputar. Sebab orang yang selama ini menjadi pelindung dan pembela dakwahnya sudah berkata: “Janganlah aku ini sampai engkau bebani lebih dari kemampuanku.”

Dengan mata yang berlinang Muhammad Saw menjawab: “Wahai Paman, andaikata mereka mampu memberikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku sudi meninggalkan tugas dakwah ini, niscaya tidak akan aku tinggalkan hingga ia menang atau aku harus mati mempertahankannya”. Sambil berkata demikian, Muhammad lalu pergi dengan iba hati.

Untuk kedua kalinya Abu Thalib mengalah karena air mata keponakannya ini. Pertama ketika ia ingin ikut bersama ke negeri Syam (dan ini adalah kali yang kedua). Abu Thalib memanggil kemenakannya seraya berkata: “Wahai anakku, teruskanlah dakwahmu dan berkatalah sesuka hatimu, demi Allah aku tak akan menyerahkanmu kepada siapapun yang tidak kamu sukai”.

Konsistensi sikap Nabi Saw tidak merusak ikatan kekeluargaan dan hubungan sosial dengan lingkungan. Nabi Saw membuktikan rahmat Islam menyelimuti segala aspek perilaku, baik dalam aktivitas bermuamalah, dalam kondisi darurat perang, maupun dalam berinteraksi dengan beragam kelompok sosial dan bangsa lain.

Namun Islam yang penuh rahmat tidak bermakna bahwa umat Islam bersikap lemah dan membiarkan berbagai keburukan, penyelewengan, penyimpangan yang mungkin muncul di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat atau bahkan juga di kalangan penyelenggara negara, yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Kewajiban Muslim adalah memperbaiki dan mencegah keburukan semampu mungkin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, maupun dengan nasihat dan dialog yang baik dengan penuh hikmah, kasih sayang serta kelemahlembutan.

Jika apa yang dilakukan belumlah mendatangkan keberhasilan, maka yang diperlukan adalah kesabaran dan tidak melakukan tindakan pencelaan, pemaksaan ataupun kekerasan. Kesabaran ini diikuti dengan upaya-upaya perbaikan dalam bentuk pendidikan, pembinaan, pembangunan moral masyarakat, dan gerakan kultural lainnya.

Dalam konteks bernegara, perjuangan politik dilakukan dengan mengedapankan cara yang konstruktif untuk mewujudkan perubahan melalui jalan dialog, musyawarah, bekerjasama, bertukar pikiran, beradu gagasan, dan kemudian memberikan kontribusi nyata sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, baik sebagai legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Tantangan dan hambatan mungkin sangat berat dan sulit, namun tetaplah dihadapi dengan jiwa yang tangguh dan kuat, namun penuh kelembutan dan ketenangan.

Kita belajar dari sejarah kenabian, bagaimana Nabi Muhammad Saw berdialog dengan tokoh pembesar suku di zamannya, mendengarkan aspirasi yang mewakili mayoritas masyarakat. Kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah, tokoh Bani Makhzum untuk mengajak Muhammad berkompromi. Sebagaimana diketahui, Bani Makhzum adalah suku yang terkenal kaya raya dan berpengaruh. Saat menemui Muhammad Saw, Utbah berkata: "Wahai keponakanku, aku ini mengenal kedudukan dan martabatmu di kalangan sukumu Quraisy. Kini engkau membawakan bagi mereka sebuah gagasan yang berat sekali. Engkau telah memecah belah persatuan mereka, dan memandang rendah akal budi mereka. Maka dengarkanlah baik baik, apa yang hendak aku tawarkan kepadamu, mungkin di antaranya ada yang dapat engkau terima. ...

Jika dengan gerakanmu ini yang kau tuju adalah harta benda, maka akan kami kumpulkan sebanyak-banyaknya sehingga engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Kalau yang engkau kehendaki itu kedudukan, maka akan kami jadikan engkau penghulu kami, hingga tak akan ada keputusan yang diambil tanpa ada persetujuanmu. Jika yang engkau inginkan hendak menjadi raja, maka kami bersedia mengangkatmu menjadi raja kami. Kalau yang mendatangimu itu gangguan jin yang tak berdaya engkau melawannya, maka kami bersedia untuk menyembuhkannya, berapapun besar biayanya kami akan tanggung”.

Muhammad SAW bertanya: “Sudahkah selesai tawaranmu itu?”. “Ya, sudah” jawab Utbah. Beliau pun membacakan surah As Sajdah ayat 1-15. Terus dibacanya surah tersebut dengan bertumpu kepada kedua tangannya. Utbah menyimak bacaan beliau hingga ayat sajdah dan melihat Nabi Muhammad SAW bersujud menghadap Ka'bah. Rasulullah Saw pun mengungkapkan pada Utbah bahwa apa yang dibacakannya merupakan jawaban atas perkataan Utbah kepada Rasul.

Ayat yang dibacakan itu berarti: "Alif Laam Miim. Turunnya Al Quran itu tidak ada keraguan padanya (yaitu dari Tuhan seluruh alam). Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan, "Dia (Muhammad) telah mengada-adakannya". Tidak, Al Quran itu kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau; agar mereka mendapat petunjuk..."

Ketika tiba di ayat ke-15 ini, Rasulullah lalu bersujud sementara itu Utbah wajahnya pucat pasi. Ia demikian terpesona dan akhirnya minta kepada Rasulullah supaya menyudahi penuturannya sampai di situ saja. Utbah lantas menemui kaumnya. Para kawannya melihat, wajah Utbah berubah usai bertemu Rasulullah jika dibandingkan sebelum bertemu sang pembawa risalah Islam itu. "Apa yang terjadi denganmu, wahai Abul Walid?" tanya seseorang.

Utbah menjawab, "Tadi aku mendengar suatu perkataan—yang demi Tuhan tidak pernah kudengarkan yang seperti itu sama sekali. Demi Tuhan, itu bukan syair, bukan ucapan tukang sihir dan tenung. Wahai orang-orang Quraisy, turutilah aku dan serahkanlah masalah ini kepadaku. Biarkan orang itu (Muhammad) dengan urusannya, dan jangan ganggu dia!"

Melihat kawan-kawannya terdiam, Utbah melanjutkan perkataannya. "Demi Allah, perkataannya yang kudengarkan tadi benar-benar menjadi berita besar jika bangsa Arab menerimanya. Jika dapat menguasai bangsa Arab, maka kerajaannya akan menjadi kerajaan kalian pula dan kemuliannya menjadi kemuliaan kalian juga."

Dari kisah sejarah itu, kita memahami bahwa kebenaran tidak dapat dikompromikan dengan penyimpangan, namun diperlukan keteguhan hati untuk menghadapi segala bentuk godaan berupa harta, tahta dan daya tarik lawan jenis. Keteguhan dan kesabaran juga diperlukan untuk menghadapi segala rupa tekanan dan ancaman. Keteguhan itu muncul karena wawasan keislaman dan orientasi perjuangan yang jelas.

Pemahaman nilai-nilai Islam yang rahmatan lil'alamin, merupakan nilai-nilai yang dipahami dan didasarkan dari ajaran *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, yaitu suatu pemahaman yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang dipahami dan dipraktikkan di berbagai tempat oleh para Sahabat Nabi SAW, para pengikut dan murid Sahabat-Sahabat Nabi SAW, para pengikut berikutnya, dan para Ulama dari generasi ke generasi hingga masa akan datang.

Kerangka pengambilan rujukan ini ditetapkan sebagai wujud pengakuan terhadap otoritas ulama dalam pengambilan sumber hukum dan nilai-nilai Islam. Hal itu juga merupakan wujud kesadaran para ulama Indonesia dan Pendiri Bangsa dalam menetapkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berasaskan Pancasila.

Bab 2 Keadilan

Keadilan merupakan kebajikan utama yang keberadaannya mutlak diperlukan sepanjang sejarah peradaban manusia.

Keadilan adalah sikap dan tindakan proporsional, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melampaui batas yang merupakan cita-cita dan tuntutan universal umat manusia. Keadilan menjadi nilai yang selalu didambakan dan sekaligus diperjuangkan kehadirannya oleh seluruh umat manusia, diejawantahkan dalam semua keadaan, baik dalam perkataan ataupun perbuatan.

Dalam Pancasila, nilai keadilan disebutkan dan dijadikan prinsip yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua Pancasila menyatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Kemudian, sila kelima Pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Adil merupakan karakter fundamental yang hendak dibentuk bagi manusia Indonesia dan keadilan adalah tujuan akhir proses pembangunan bangsa.

UUD NRI Tahun 1945 juga menyebutkan kata “adil” dan “keadilan” di dalamnya. Rujukan kata “adil” dan “keadilan” pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan secara tegas betapa agungnya nilai keadilan bagi bangsa Indonesia. Keadilan tidak hanya menjadi nilai dasar yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi pegangan yang harus dijiwai (dihayati) dan dipatuhi para penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan yang diembannya masing-masing. Keadilan dalam semua sendi kehidupan merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya cita-cita berbangsa dan bernegara.

Rasa keadilan adalah situasi naluriah yang terus tumbuh pada diri manusia dan melandasi perjuangan menegakkan keadilan yang berakar pada fitrah manusia. Hal ini menjadi kepedulian universal dan dapat diterima semua orang. Islam memandang nilai keadilan melekat dalam penciptaan manusia dan alam semesta yang bernilai intrinsik, baik dalam struktur fisik ataupun dalam perilakunya. Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan adil dan seimbang (QS. Al-Infithar: 6-8, dan QS. At-Tin: 4), demikian pula penciptaan alam semesta (QS Al-Mulk: 1-4). Karena itu, pada situasi psikis dan sosiologis tertentu, sesuai dengan tuntutan fitrahnya, manusia selalu memerlukan nilai keadilan.

Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata adil berlaku bagi segala bentuk hubungan manusia; antara penguasa dan rakyat, antar golongan, antar bangsa, antar orang-orang yang bersengketa, antar orang-orang yang membuat perjanjian di bidang muamalah, antara seseorang dengan kerabatnya, antara suami dan istrinya, antara orang tua dan anak-anaknya, dan lain sebagainya. *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. 5: 8).

Dalam al-Qur'an dijelaskan pula tugas pokok kepemimpinan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan perjanjian Ilahiah. Perjanjian itu melahirkan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Bahkan, kehadiran para Rasul di muka bumi bertujuan menegakkan keadilan. Al-Qur'an menjelaskan nilai keadilan sebagai pedoman utama bukan hanya bagi umat Islam, tapi prinsip bagi penegakan hukum di seluruh dunia.

Kampus sekuler *Harvard Law School* memajang pesan universal al-Qur'an sebagai bagian dari *Words of Justice*:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.” (Q.S An-Nisa: 135).

Oleh sebab itu, semua orbit perjuangan manusia adalah perjuangan menegakkan keadilan. Sebagai konsekuensinya, situasi kemanusiaan tidak boleh berpihak pada ketidakadilan.

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain dari Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (QS. 11: 113)

Jika situasi kemanusiaan diliputi keadilan, maka setiap individu akan dapat memerankan dirinya sebagai makhluk moral yang merdeka dalam memilih dan berkehendak. Kemerdekaan inilah yang memastikan manusia sebagai insan beradab memungkinkan kemanusiaannya menjadi utuh. Dengan kemerdekaan yang dimiliki itu pula seluruh aktivitas dan tindakannya selama di dunia, sebagai kewajiban moral, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Mereka yang selama hidupnya di dunia, dalam seluruh aktivitasnya menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak Ilahi yang dituangkan dalam agama fitrah-Nya, niscaya pada waktunya akan memperoleh kesejahteraan, baik secara fisik ataupun psikis. Untuk itu, perlu kesadaran agar setiap individu dapat membentuk kehidupan dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki.

Situasi psikis dan sosiologis manusia selalu memerlukan keadilan. Maka, tegaknya keadilan dalam totalitas kemanusiaan menjadi tuntutan mutlak yang harus direalisasikan setiap orang.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan), memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran.” (QS. An-Nahl: 90).

Tegaknya keadilan bukan hanya untuk kepentingan generasi sekarang, melainkan lintas generasi. Dalam sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, setiap manusia akan terbebas dari segala bentuk tirani dan membuahakan kesejahteraan sejati. Di sinilah letak pentingnya membangun institusi-institusi yang adil dan bekerja dengan prinsip tatakelola yang baik (*good governance*). Secara teoretis pembangunan institusi yang adil harus dimulai dengan komitmen penerapan keadilan substansial sebagai hasil persetujuan melalui proses terbuka dalam bentuk aturan, hukum, atau undang-undang.

Keadilan tidak hanya sebagai hak, melainkan juga kewajiban untuk saling menopang antar individu dan sekaligus menjadi tonggak utama bangunan masyarakat, apapun agama yang dianut. Keadilan menjadi tulang punggung kehidupan sosial-politik. Atas dasar itu, Islam memberi bekal bagi setiap individu berupa perangkat kaidah yang tidak hanya mengarahkan perilaku, yang menentukan hubungan manusia, dan yang dapat menjamin dihormatinya HAM atas dasar keadilan, tetapi juga perangkat keadilan substansial yang mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimal mungkin perilaku manusia dari ketidakadilan.

Keadilan tidak hanya diserahkan kepada keutamaan individu, melainkan juga dipercayakan kepada proses yang memungkinkan pembentukan sistem hukum yang baik. Dengan demikian keadilan distributif, komutatif, dan keadilan sosial dapat terwujud.

Wujud kongkret nilai keadilan pada watak kemanusiaan adalah sikap pertengahan, yakni kondisi keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrim: berkekurangan (*ifrath*) dan berlebihan (*tafrith*). Sedangkan keseimbangan (*tawazun*) hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad) secara proporsional menjadi pangkal kesejahteraan, yang akan melahirkan kebahagiaan hakiki. Sikap moderasi dari dua ekstremitas yang dilandasi nilai keadilan telah menjadi kekhususan umat Islam dan karakteristik sistemnya dalam semua persoalan manusia dan kemanusiaan.

Hal itu dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya: *“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil (pertengahan) dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu.”* (QS. Al-Baqarah: 143).

Atas dasar kenyataan tersebut, maka keadilan hanya dapat diwujudkan oleh manusia yang dirinya benar-benar menyadari bahwa kewajiban menegakkan keseimbangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan dan misi penciptaannya. Karena itu, manusia harus membuktikan kedudukan kehambaan-Nya kepada Allah dan posisinya sebagai hamba Allah SWT di muka bumi secara terintegrasi. Sebab, hanya dalam keadaan seperti itulah manusia benar-benar dapat hidup selaras dengan fitrahnya yang paling pokok, yaitu keseimbangan dan keadilan. Kedudukan seperti itu pula yang dapat menjamin kehormatan seluruh manusia, tanpa ada penindasan, penghambaan manusia kepada sesama manusia, dan pengkastaan.

Keadilan akan membuahkan pencapaian kesempurnaan dan kebahagiaan spiritual (ruhiyah), intelektual (aqliyah), fisik (jasadiyah), dan berujung pada suatu kebahagiaan yang sejati. Nilai keadilan dipandang sebagai kebajikan utama umat manusia juga sebagai kebaikan yang paling sempurna. Keseimbangan yang sempurna hanya mungkin diwujudkan dan diintegrasikan dengan keadilan, sesuai dengan makna keadilan (*'adalah*) itu sendiri yang berasal dari akar yang sama dengan kata keseimbangan (*i`tidal*).

Semangat menegakkan keadilan dalam setiap dimensi kehidupan harus mewarnai aktivitas individual dan kolektif, harus menjadi fokus utama setiap aksi, serta harus menjadi pola perjuangan otentik manusia sepanjang sejarahnya. Perjuangan menegakkan keadilan sejalan dengan mewujudkan kesejahteraan dan merupakan tugas otentik setiap manusia, bahkan menjadi karakteristik misi para Nabi dalam menyampaikan risalah-Nya. Maka, baik secara individu ataupun kolektif, setiap manusia dituntut terlibat dalam perjuangan menegakkan keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan selama hidupnya di dunia.

Setiap diri akan dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan tugas ini di akhirat kelak. Apabila keadilan telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan manusia, maka kehidupan akan seimbang. Sedangkan keseimbangan hidup akan melahirkan kebahagiaan yang ditandai oleh adanya ketenteraman dan kesejahteraan yang merata. Sebaliknya bila keadilan tidak menjadi acuan utama kehidupan, maka kehidupan manusia akan sengsara.

Bab 3 Kebangsaan

“Wawasan kebangsaan dibangun dengan kesadaran bahwa Islam mengajarkan umat manusia untuk mencintai Tanah Airnya dan menjaga kesepakatan luhur yang diwarisi dari generasi ke generasi.”

Sebagai partai berasas Islam *rahmatan lil alamin*, PKS memiliki paradigma yang berakar dari keyakinan bahwa kecintaan terhadap tanah air merupakan implementasi keimanan seseorang. Wawasan itu berkembang sesuai interaksi dengan kenyataan sosial-politik di Indonesia. Paradigma adalah cara pandang seseorang atau suatu lembaga terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Kebangsaan PKS merupakan cara pandang Partai tentang jati diri dan eksistensinya dalam perjalanan sejarah Indonesia dan peran yang dijalankan demi mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Paradigma itu dibangun dengan kesadaran bahwa Islam mendorong munculnya nasionalisme, bahkan melalui rahim Islam, nasionalisme Indonesia dapat tumbuh subur.

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat membela Tanah Air atau patriotisme.

Pergerakan Islam sejak era pra-kemerdekaan telah berupaya merajut ikatan kebangsaan, ketika organisasi-organisasi kedaerahan yang berbasis etnik mulai tumbuh. Islam dalam dinamika sejarah Indonesia terbukti menjadi faktor integrasi dan kohesi sosial, bahkan lebih jauh lagi menjadi akar nasionalisme dan pembentukan negara-bangsa modern. PKS menyadari posisinya sebagai salah satu elemen bangsa dalam perjuangan menuju Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sebagai entitas politik nasional, PKS berjuang dengan misi menjadi sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bersama entitas politik dan elemen bangsa lainnya, PKS berupaya mewujudkan tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional tersebut, PKS mendeklarasikan eksistensinya sebagai partai Islam *rahmatan lil alamin* yang merangkul semua komponen bangsa dengan latar belakang berbeda, serta memadukan perjuangan dalam menegakan nilai-nilai Islam dan kebangsaan secara struktural dan kultural dalam maknanya yang positif dan obyektif, demi terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Perjuangan secara struktural dilakukan melalui jalur politik, dimana Islam tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai bentuk dari pengamalan prinsip musyawarah dan *amar ma'ruf nahyi munkar*, menegakkan keadilan dan menebarkan amal kebajikan, sementara perjuangan secara kultural dilakukan melalui berbagai media dakwah dan pranata budaya, untuk menguatkan basis kebudayaan dan intelektualitas bangsa, mendorong mobilitas vertikal berbasis meritokrasi dalam berbagai lapangan, baik dalam ranah birokrasi, ekonomi, intelektual, maupun sosial-budaya.

Dalam menjalankan misi perjuangannya, PKS memandang penting untuk merevitalisasi dan mengokohkan ciri-ciri akhlak mulia, inovatif dan patriotik. Akhlak mulia (budi luhur) merupakan manifestasi dari keyakinan yang lurus dan tekad untuk berbuat kebajikan kepada semua makhluk. Ciri inovatif melekat pada kelompok atau komunitas ilmiah dan kreatif yang sarat dengan ilmu pengetahuan dan selalu mencari cara-cara baru dalam memecahkan masalah kehidupan. Sedangkan sikap patriotik memperlihatkan kesiapan untuk berkorban dan membela kebenaran serta keadilan dalam kondisi apapun.

Dalam episoda pergerakan modern menjelang kemerdekaan, umat Islam telah aktif membangkitkan kesadaran nasional untuk berjuang melalui jalur organisasi sosial-ekonomi dan tidak hanya melalui jalur perang melawan penjajahan, antara lain dengan berdirinya Jami'at Kheir (1901) dan Syarikat Dagang Islam (SDI, 1904) yang kemudian bermetamorfosis menjadi Syarikat Islam (SI, 1912). Pada saat itu muncul pula organisasi kebangsaan seperti Boedi Oetomo (1908) dan Indische Partij (1912).

Organisasi dakwah turut berperan semisal Muhammadiyah (1912), Mathlaul Anwar (1916), Persatuan Umat Islam (PUI, 1917), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926), dan banyak lagi yang lain. Organisasi berskala nasional dan modern itu menghendaki pemerintahan sendiri oleh rakyat Indonesia dan menuntut kemerdekaan sepenuhnya dari penjajahan asing.

Para Pendiri Bangsa menyadari kemerdekaan tidak dapat diraih hanya dengan bermodalkan semangat anti-penjajahan, karena itu harus dilandasi kesadaran akan rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan kebangsaan yang kokoh. Tekad para tokoh pemuda di seluruh wilayah Nusantara akhirnya mengkrystal menjadi Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) yang membentuk identitas kebangsaan di abad ke-20. Inisiatif dan gagasan tentang kemerdekaan terus dimatangkan di tengah tekanan penjajahan dan perubahan kekuatan global pada era Perang Dunia II.

Proklamasi kemerdekaan dan format kenegaraan yang dibentuk pasca kemerdekaan merupakan hasil pemikiran dan diskusi panjang para Pendiri Bangsa yang mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI pada 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945) hingga tercapai kesepakatan luhur yang disebut Piagam Jakarta (22 Juni 1945).

Kesepakatan itu disempurnakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI terbentuk 7 Agustus 1945) dalam sidang perdana pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Inilah momen historik yang menunjukkan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya membutuhkan perjuangan fisik bersenjata dan diplomasi antarbangsa untuk mendapat pengakuan kedaulatan, melainkan juga konsensus nasional di antara tokoh-tokoh bangsa.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan beberapa nilai dasar yang menjadi pegangan bangsa Indonesia, yaitu: kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, perjuangan pergerakan kemerdekaan melalui proses panjang menuju pintu gerbang kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan berdasarkan rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong keinginan luhur, serta pembentukan pemerintahan Negara Indonesia memiliki tujuan jelas.

Di samping itu, susunan pemerintahan diatur dalam konstitusi dan negara berdasarkan lima prinsip utama yang telah disepakati, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila itu kemudian dikenal sebagai Pancasila.

PKS memandang warisan sejarah ini harus dipahami, dijaga dan dipertahankan dari generasi ke generasi demi keutuhan dan kedaulatan NKRI. Pada masa reformasi, eksponen Partai turut mengawal proses Amendemen UUD 1945 yang antara lain tetap mempertahankan konsensus nasional: Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PKS pernah mendapat amanah sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (periode 2004-2009) serta memelopori agenda sosialisasi hasil-hasil Amendemen UUD 1945.

Agenda sosialisasi selanjutnya diperluas mencakup 4 Pilar MPR, yakni: Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang mempersatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Bersama komponen bangsa yang lain, PKS terus mengokohkan dan menguatkan pemahaman dan pengamalan 4 Pilar MPR.

PKS terus mengembangkan diskursus tentang nasionalisme dan keterbukaan serta menanamkan wawasan kebangsaan guna mewujudkan nasionalisme substantif. PKS meyakini, bahwa proses reformasi dan transformasi bangsa ini hanya dapat dijalankan oleh suatu kelompok kritis dan berintegritas di dalam maupun di luar organisasi sosial-politik yang memiliki kesalehan moral, kesalehan sosial, dan kesalehan profesional, serta memiliki daya rekat bangsa.

Bab 4 Kenegaraan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan rahmat Allah yang perlu disyukuri dan dijaga untuk mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

PKS memandang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hasil pemikiran para Pendiri Bangsa, dan perjuangan serta pengorbanan seluruh komponen bangsa. Kesepakatan Pendiri Bangsa dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tentang dasar negara (Pancasila) dan tujuan hidup bernegara perlu terus dijaga.

Negara merupakan wadah bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, serta medan interaksi yang bersifat terbuka, adil dan obyektif bagi seluruh warganya yang berlatar sangat majemuk. Sebagai panggung pengabdian, negara adalah arena kompetisi positif dimana terjadi kontestasi gagasan terbaik bagi pengelolaan negara dalam bentuk kebijakan publik yang otoritatif.

... Dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, maka tersedia basis moral yang kokoh untuk selanjutnya membangun sistem kenegaraan yang sehat bagi bangsa modern.

Bagi PKS, politik kenegaraan dijalankan dengan sikap adil dan bijaksana terhadap semua kelompok/golongan atau organisasi politik manapun, serta mengacu pada prinsip konstitusional, proporsional dan demokratis, agar dapat menghasilkan perjuangan yang benar-benar dapat merealisasikan cita-cita dan semangat reformasi. Eksponen pendiri PKS terlibat langsung dalam gerakan reformasi tahun 1998 yang antara lain mencanangkan: pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; amandemen UUD 1945, penegakan supremasi hukum, otonomi daerah, serta pemilihan umum secara demokratis.

Berdasarkan semangat reformasi, PKS memperkuat komitmen pada nilai bersih, peduli, profesional dan negarawan. Bersih dan Profesional adalah cermin dari kesalehan personal (moral) yang menjadi fondasi dari tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang bersih (clean government), dan berwibawa. Peduli dan negarawan adalah cermin dari kesalehan sosial (kolektif) yang merupakan modal utama untuk pengambilan keputusan yang berpihak pada solidaritas kebangsaan dan kemanusiaan. Karena keterbatasan manusia, maka semua nilai penting harus dilembagakan dalam sistem dan aturan yang memandu perilaku kolektif.

Dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berlaku universal. Dalam konteks Indonesia, AUPB meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas (Good Governance). Serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government). Inilah warisan reformasi yang sejalan dengan spirit Proklamasi Kemerdekaan RI dan menurut PKS wajib diperjuangkan.

Dalam rangka mewujudkan AUPB yang efektif, PKS mendukung penuh penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN yang melibatkan semua lembaga negara, terutama aparat penegak hukum dan termasuk anggota partai politik yang akan mengisi kursi pejabat negara. Penguatan secara kelembagaan dalam upaya pemberantasan korupsi patut untuk didukung dan diupayakan secara berkesinambungan. Reformasi partai politik dan institusi negara yang selama ini berjalan perlu terus diperkuat dan diperkokoh dengan reformasi birokrasi untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi (*clean government*).

Cerminan reformasi birokrasi dapat terlihat dalam pelayanan publik yang menetapkan asas: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, non-diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas bagi kelompok rentan, serta asas kecepatan dan kemudahan sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sebagai bagian dari upaya bersama seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka PKS merumuskan Falsafah Dasar Perjuangan untuk menjadi acuan penyusunan Platform Kebijakan Pembangunan yang terdiri dari 12 sendi bernegara, yaitu:

- 1) **Keagamaan;** *Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kebebasan beragama bagi para pemeluknya, mewujudkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama sebagai landasan pembangunan bangsa.*
- 2) **Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia;** *Pengokohan nilai kedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pemantapan negara hukum dengan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.*
- 3) **Pertahanan dan Keamanan;** *Pertahanan dan keamanan menjamin kedaulatan dan ketertiban negara dengan melibatkan partisipasi seluruh rakyat.*

- 4) **Ekonomi;** *Pemenuhan kebutuhan dasar warga dan pemerataan kesejahteraan merupakan kunci kemakmuran bangsa yang ditopang oleh pengokohan kelembagaan.*
- 5) **Pertanian dan Kelautan;** *Pertanian, kelautan, dan kedaulatan pangan sebagai sokoguru ketahanan dan kemandirian pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan*
- 6) **Ketenagakerjaan;** *Bekerja tidak hanya sebagai pelaksanaan kewajiban tetapi dilandasi kesadaran pentingnya nilai kerja dalam harkat kemanusiaan sehingga membangun hubungan ketenagakerjaan berkeadilan.*
- 7) **Sumber Daya Alam, Agraria, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;** *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia dan dijalankan secara amanah berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.*
- 8) **Pendidikan, Sosial dan Budaya;** *Pendidikan komprehensif dan integratif berbasis iman dan taqwa adalah kunci utama konstruksi tatanan sosial dalam menghadapi dinamika perubahan dan pengelolaan keragaman sosial budaya.*

- 9) Kesehatan;** *Pola hidup sehat dan jaminan kesehatan masyarakat merupakan prasyarat pembangunan manusia Indonesia yang sehat, kuat dan sejahtera.*
- 10) Hubungan Internasional;** *Pengokohan pelaksanaan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta dukungan terhadap hak kemerdekaan setiap bangsa.*
- 11) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;** *Pengembangan riset dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan landasan ketuhanan dan etika profesional untuk kepentingan pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat.*
- 12) Individu, Keluarga, dan Kemitraan Laki-laki dan Perempuan;** *Kemitraan laki-laki dan perempuan yang menjunjung nilai-nilai kebajikan, keadilan, keseimbangan, saling melengkapi serta terbebaskan dari sikap diskriminasi sebagai dasar kemajuan bangsa.*

Bab 5 Kesejahteraan

“Memajukan kesejahteraan umum merupakan cita-cita nasional yang harus diperjuangkan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Perjuangan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus bermuara pada terwujudnya kesejahteraan hidup dan kemakmuran seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Tugas memakmurkan bumi tersebut untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia, adalah tugas mulia, tugas suci, tugas kenabian dan kerasulan, tugas membangun peradaban, mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, tugas kepemimpinan dunia yang atas tugas itu Allah menciptakan manusia di atas permukaan bumi.

Apabila tugas pemakmuran dan pemeliharaan itu berjalan dengan baik, maka manusia pantas menempati posisinya sebagai pemimpin di atas muka bumi. Sebaliknya, apabila tugas itu diabaikan, dan hanya melakukan eksploitasi alam dengan keserakahan dan kesombongan, maka manusia akan kehilangan legitimasinya sebagai pemimpin.

Kesadaran universal dan transendental itulah yang mengilhami Pendiri Bangsa tatkala merumuskan tujuan negara Indonesia merdeka dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

PKS memandang tujuan ini tidak hanya amanat konstitusi tetapi sekaligus amanat sejarah dari generasi kegenerasi, karena bangsa Indonesia pernah mengalami penderitaan panjang sebagai rakyat terjajah, sehingga kemerdekaan menjadi pintu gerbang untuk mewujudkan perlindungan rakyat, kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa dan kontribusi bagi ketertiban dunia. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur.

Kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh tiga unsur fundamental yaitu: kualitas sumberdaya manusia; kemampuan mengelola potensi sumberdaya alam yang dimilikinya; kemampuan mengelola peluang, waktu dan kesempatan yang dimilikinya. Ketiga karunia dasar itu perlu dikelola dengan penuh kecerdasan melalui sistem tata kelola yang baik, adil dan bijaksana, serta berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa, demi terwujudnya *Baladun thayibatun wa Rabbun ghafur*.

Pemenuhan kesejahteraan hidup lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia mensyaratkan terpenuhinya hak-hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut: (1) hak untuk memilih dan memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya; (3) hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (4) hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; (5) hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; (6) hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya; (7) hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak nya secara kolektif, membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; (8) hak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian dan perlakuan yang sama di depan hukum; (9) hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil; (10) hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati dan nuraninya; (11) hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat; (12) hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh layanan kesehatan; (13) hak mempunyai kepemilikan pribadi.

Pemenuhan hak-hak tersebut harus diperhatikan, terutama oleh mereka yang memegang peran kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Upaya pencapaian kesejahteraan umum yang mencakup pemenuhan hak-hak asasi sebagaimana tersebut dalam Falsafah Dasar Perjuangan Partai ini akan diuraikan secara lebih rinci melalui Platform Kebijakan Pembangunan Partai untuk dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Penutup

“...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Sesungguhnya rasa keadilan adalah situasi kemanusiaan yang terus menerus tumbuh pada diri manusia. Bagaikan air, perjuangan menegakkan keadilan adalah mata air yang terus memancar dari fitrah manusia, dan karenanya mengalir deras pada orang-orang yang senantiasa menjaga kejernihan nuraninya. Keadilan dengan demikian menjadi kepedulian bagi semua orang. Islam memandang nilai keadilan menyatu dengan penciptaan manusia, nilai yang melekat, baik dalam struktur fisik maupun dalam perilakunya.

Nilai-nilai keadilan sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 menuntut penjabaran yang kongkrit pada seluruh tatanan dan berbagai dimensi kehidupan. Semua konsepsi dan sistem yang dibangun secara integratif dalam bingkai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa pada akhirnya akan bermuara kepada tegaknya nilai keadilan. Proses transformasi nilai keadilan yang telah menjadi keyakinan bersama harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi pandangan dan perilaku hidup antargenerasi sehingga menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indonesia sebagai sebuah bangsa, akan melalui jalan panjang dalam proses penegakan keadilan, baik bagi negerinya sendiri maupun dalam peran globalnya untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Penegakan keadilan tersebut merupakan proses yang tidak pernah berhenti dan akan terus dilakukan bersama bangsa-bangsa lainnya dalam rangka memenuhi tugas otentik kemanusiaan yang harus diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam sejarah peradaban umat manusia dan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Falsafah Dasar Perjuangan Partai dihadirkan dalam rangka mewujudkan komitmen kepeloporan PKS untuk terus bersyukur atas nikmat dan karunia Allah SWT kepada bangsa Indonesia dan untuk landasan perjuangan partai demi tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia. Menghadirkan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Baladatun Toyibatun wa Robbun Ghofur.

Program Pembinaan SDM Strategis Jesuit



Mobilitas Vertikal & Horizontal Kader Dakwah di Turki

Tujuan utama

Menciptakan bangunan sosial yang Islami di tengah masyarakat Turki yang sekuler

Golongan Pendukung

Gerakan An Nur, gerakan Sulaimaniyah, sejumlah kelompok sufi seperti Tarekat Nasyahbandi, Partai politik berbasis Islam (Partai Refah, Fadhilah, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP))

Prinsip Dasar Perjuangan

- Non konfrontatif dan keteladanan
- Gerakan Islam harus jauh dari logika revolusi frontal dan memilih pola perjuangan jangka panjang
- Tidak menjadikan pengambilalihan kekuasaan sebagai program prioritas dalam jangka pendek
- Al Qur'an menganjurkan perubahan secara bertahap

Penyebaran Kader

Sektor Public

Sektor Private

Sektor Ketiga

- Tahun 1960-an, buku-buku karangan Ulama Sheikh Al Nursi disebarkan ke Akademi Militer

- Tahun 1970 Gerakan Islam merekrut dan membina pelajar dan mahasiswa yang cerdas untuk ditempatkan di rumah mereka tanpa biaya kemudian memasukkannya ke lembaga sipil negara, polisi dan militer

- Tahun 2000 Partai Islam Turki memenangkan Pemilu Parlemen dan menjadi Perdana Menteri

MOBILITAS VERTIKAL & HORIZONTAL



Mobilitas Vertikal & Mobilitas Horizontal

